

BAB V

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Implikasi disertasi ini: adalah pentingnya membangun dan mempersiapkan “calon kepala daerah” yang dari awal telah terdeteksi bahwa dirinya memiliki gaya kepemimpinan transformational, dan juga usianya cukup matang (diatas 40 tahun) dan pendidikan tidak terlalu tinggi yaitu S2. Untuk itu, menjadi penting bagi partai untuk melaksanakan kaderisasi.

A. Kebijakan

Terwujudnya kepala daerah yang kepemimpinannya mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat guna memampukan semua komponen melihat daerah sebagai Indonesia dalam rangka terciptanya kepemimpinan kepala daerah yang secara politis terpaut bukan kepada partai politik dan daerahnya, tetapi berpaut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan *Political Nationalism Leadership Engagement* kepala Daerah se Indonesia maka diperlukan adanya pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin merupakan tokoh sentral dan pemimpin harus menyadari kekuatan dari masing-masing pengikutnya dan mengidentifikasi daerah-daerah sehingga dapat focus dalam melakukan berbagai upadiperbaiki (Bruce E. Winston dan Kathleen Patterson, 2006). Pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi agar lebih efektif sehingga mampu memberdayakan pengikut, membangun kepercayaan dan rasa hormat mereka (Aric Hall, 2007). Sebagaimana diketahui bahwa gaya

kepemimpinan dan kompetensi pemimpin merupakan elemen kunci (J. Rodney Turner dan Ralf Muller, 2005).

Peneliti memberikan sumbang saran implementasi kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas pemimpin agar lebih transformatif. Pemimpin perlu dibekali dengan berbagai kompetensi sehingga mampu bekerja secara adaptif dan fleksibel terlebih dalam menghadapi perubahan sehingga mampu menghadapi tantangan serta menghasilkan solusi kreatif untuk berbagai permasalahan yang kompleks (Bennis, 2001).

Pemimpin yang transformasional mampu menjadi motor penggerak sekaligus pemancar budaya inovatif. Pemimpin yang transformasional juga menyebarkan pengetahuan yang berorientasi pada peningkatan kinerja (Garcia-Morales, Jimenez-Barrionuevo dan Gutierrez-Gutierrez, 2012). Pemerintah juga perlu mengupayakan pemberdayaan kepala daerah sebagai pemimpin yang senantiasa menyadari tindakannya sehingga para pengikutnya tahu apa yang benar dan penting. Proses ini dilakukan dengan memberikan motivasi untuk memenuhi harapan dan mendorong mereka melihat jauh ke dalam dirinya demi kebaikan organisasi (Muenjohn, 2007). Kondisi ini sangat penting agar terwujud pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan mau bergerak sekalipun dalam kondisi yang susah (Bass, 1985).

B. Strategi

1. Terwujudnya sistem kaderisasi partai politik yang berorientasi pada negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaderisasi dalam partai politik sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian ditengah iklim perubahan, kaderisasi partai politik harus dilakukan secara murni dan tetap memegang teguh falsafah dan ideologi bangsa sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya ini harus dilakukan secara simultan dan paralel oleh berbagai pihak mengingat peran penting pemimpin dalam membawa arah politik yang memegang teguh prinsip nasionalisme sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki beraneka keragaman baik budaya, suku bangsa, agama dan golongan. Kondisi Indonesia yang multikultural menjadikan Indonesia sangat rentan oleh berbagai isu politik. Namun dengan adanya pemimpin yang nasionalis maka dapat membantu pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam melakukan kaderisasi politik, karakter kebangsaan yang mencerminkan ideologi Pancasila harus senantiasa dihidupkan. Pemimpin harus mampu mewujudkan diri sebagai pemimpin yang memiliki karakter kerohanian yang meyakini keTuhanan yang Maha Esa, karakter kemanusiaan yang adil dan beradab, karakter persatuan Indonesia, karakter kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta karakter yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

2. Terwujudnya sistem kepemimpinan nasional yang terintegrasi pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa.

Kondisi demografi bangsa Indonesia harus menjadi dasar bagi para pemimpin untuk senantiasa mewujudkan kepemimpinan yang nasionalis yang tidak membedakan daerah satu dengan yang lain, namun tetap memandang sama berbagai daerah ini sehingga dapat menerapkan kepemimpinan nasional yang terintegrasi. Kebijakan pusat harus dapat dirasakan sama di setiap daerah dan kondisi setiap daerah juga senantiasa menjadi pertimbangan bagi pusat dalam menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan.

C. Upaya

Dalam rangka mewujudkan kebijakan kepala daerah yang kepemimpinannya mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat guna memampukan semua komponen melihat daerah sebagai Indonesia dalam rangka terciptanya kepemimpinan kepala daerah yang secara politis terpaut bukan kepada partai politik dan daerahnya, tetapi berpaut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan strategi mewujudkan sistem kaderisasi partai politik yang berorientasi pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan sistem kepemimpinan nasional yang terintegrasi pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa.

Untuk lebih memperkaya wacana dan informasi tentang bagaimana mewujudkan kebijakan tersebut di atas, dan melengkapi dua strategi tersebut di atas, maka peneliti telah mengadakan Focus Group Discussion dengan dua pakar politik

di Indonesia, yaitu 1. Bp Yorris Raweyai, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, dan 2. Bp Arifin Seman, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kedua politisi tersebut pada dasarnya mempunyai pemikiran yang hampir sama dalam mewujudkan kebijakan tersebut di atas sebagai berikut:

1. Pada dasarnya mereka membenarkan tentang permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, serta hasil temuannya, dan mereka menyampaikan bahwa sebenarnya masing-masing partai politik biasanya telah melakukan seleksi bakal calon Kepala Daerah yang akan diajukan dalam pilkada. Mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), telah menyeleksi bakal calonnya lebih kurang sepuluh orang bakal calon yang akan diajukan ke tingkat Dewan Pimpinan Daerah, kemudian oleh Dewan Pimpinan Daerah diseleksi menjadi lebih kurang lima bakal calon untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Oleh Dewan Pimpinan Pusat diseleksi kembali menjadi satu orang sebagai calon yang akan maju dalam pilkada.
2. Dari penjelasan mereka seleksi calon kepala daerah sudah cukup memadai, namun dalam temuan hasil penelitian ini mengatakan bahwa penilaian masyarakat terhadap kepala daerah yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, kepemimpinannya lebih berorientasi sebagai pemimpin daerah dan bukan sebagai pemimpin nasional dibanding yang dari PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat secara signifikan pada $\alpha < 0,05$, dan Penilaian masyarakat terhadap kepala daerah yang berasal dari PKS, kepemimpinannya tidak transformatif dibanding yang dari PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum semua kader partai melaksanakan kedua strategi tersebut di atas. Mereka berdua juga mengatakan bahwa di samping partai politik sendiri memberikan pengertian yang mendalam kepada semua para kadernya terhadap pentingnya kedua strategi di atas untuk mewujudkan kebijakan kepala daerah yang kepemimpinannya mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat guna memungkinkan semua komponen melihat daerah sebagai Indonesia dalam rangka terciptanya kepemimpinan kepala daerah yang secara politis terpaut bukan kepada partai politik dan daerahnya, tetapi berpaut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Selanjutnya mereka berdua mengatakan bahwa diperlukan juga perubahan yang mendasar dari Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Karena hal ini menyangkut perubahan undang-undang maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus duduk bersama dengan segera menyelesaikan perubahan undang-undang tersebut. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan para pembantunya harus secara intensif melakukan pengawasan agar perubahan undang-undang tersebut dapat terwujud dan dapat dilaksanakan sampai kelapisan masyarakat paling bawah.

Menurut peneliti perubahan undang-undang adalah baik, karena undang-undang adalah payung hukum dari setiap warga negara Indonesia dalam hal melakukan tindakan hukum, namun sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa sesuai dengan penilaian masyarakat Indonesia sekaligus menjadi suatu kebutuhannya di mana dimensi yang paling menentukan dalam membentuk *Political Nationalism Leadership Engagement* adalah dimensi *Transformational Leadership* atau kepemimpinan yang dapat merubah paradigma berpikirnya masyarakat dalam

melihat daerah sebagai satu kasatuan yang utuh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perubahan paradigma berpikir, sikap dan perilaku ini berpaut pada jiwa individu masyarakat. Hasil temuan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah: Masyarakat Menilai bahwa Kepala Daerah Se Indonesia Cenderung Hanya Berorientasi sebagai Pemimpin Daerah Secara Signifikan Pada $\alpha < 0,05$ ²¹⁵, dan *transformational leadership* kepala daerah adalah indikator yang paling dominan menentukan terbentuknya *political nationalism leadership engagement* dan temuan lainnya adalah adanya perbedaan *political nationalism leadership engagement* jika dibedakan berdasarkan katagori latar belakang kepala daerah.

Dari temuan tersebut di atas pada dasarnya adalah menyangkut jiwa, sikap dan perilaku nasionalisme yang menurut peneliti merupakan masalah yang cukup serius bagi bangsa Indonesia dan perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin mampu menerapkan *idealized influence*, dimana pemimpin dikagumi, dihormati dan dipercaya. Pengikut mengidentifikasi dengan keinginan meniru pemimpin mereka.
2. Pemimpin secara konsisten melakukan segala sesuatu berdasarkan etika, prinsip dan nilai-nilai.
3. Pemimpin menerapkan *inspirational motivation* dimana pemimpin berperilaku dengan cara yang memotivasi orang-orang di sekitar mereka dengan memberikan arti dan tantangan bagi pengikutnya sehingga membuat mereka termotivasi, semangat, antusias dan optimis.

²¹⁵Perhitungan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 11.

4. Pemimpin menerapkan *intellectual stimulation* yaitu mendorong pengikutnya untuk lebih kreatif dan inovatif dan memberikan ide baru dalam menangani permasalahan.
5. Pemimpin juga harus memiliki pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan setiap individu untuk berprestasi dan bertumbuh sehingga dapat mengembangkan potensi dan memiliki kesempatan baru untuk terus belajar.
6. Pemimpin mampu menjadi model dalam berperilaku secara etis sehingga pengikut dapat merasakan energi dengan tujuan yang jelas serta mampu mengidentifikasikan pemimpin berikut visinya, serta
7. Pemimpin mampu merespon segera setiap masalah yang menjadi serius untuk mengambil tindakan korektif serta menghindari mengambil keputusan terlebih dahulu.

Salah satu parameter untuk mengukur kualitas demokratisasi adalah sirkulasi kepemimpinan politik yang lancar dengan sokongan kaderisasi kepemimpinan yang melembaga. Kontestasi politik pada sistem demokrasi liberal semestinya dikawal oleh ketersediaan jalur-jalur kaderisasi kepemimpinan yang mampu memunculkan kader-kader pemimpin politik yang handal. Ada indikasi yang sangat kuat bahwa reformasi di tingkat kelembagaan dan prosedural yang telah digulirkan selama hampir satu dasawarsa di negeri ini, nyaris tidak disertai dengan perbaikan yang signifikan pada jalur kaderisasi kepemimpinan politik. Publik seolah masih dipaksa untuk memberikan ruang di panggung politik bagi aktor-aktor lama. Sementara ironisnya, sebagian besar survei yang dilakukan menunjukkan kerinduan publik atas tampilnya figur pemimpin alternatif. Tampilnya politisi-saudagar yang mendominasi panggung utama politik Indonesia juga ternyata belum banyak pengaruhnya bagi modernisasi parpol.

Harapan akan terjadinya proses penguatan organisasi parpol di bawah kendali para *entrepreneur* ini belum sepenuhnya terjadi. Kinerja partai politik justru semakin mengecewakan publik. Partai politik kini cenderung didominasi oleh faksi-faksi politik dengan orientasi yang kuat ke arah pragmatisme. Jika partai politik yang semestinya menjadi institusi inti dalam proses demokratisasi saja sudah bercorak pragmatistis, sulit dibayangkan bahwa demokratisasi juga akan diwarnai oleh nilai-nilai dan tradisi berpolitik yang baru.

Dalam khasanah studi kepemimpinan, gaya kepemimpinan politisi-saudagar ini bisa dikategorikan sebagai kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*). Model kepemimpinan ini terjadi ketika pola relasi antara pemimpin dengan konstituen, maupun antara pemimpin dengan elit politik lainnya dilandasi oleh semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik (Burns 1978). Transaksi suara, janji-janji material bagi pemilih dan penghargaan atas loyalitas personal merupakan praktik-praktik yang lazim dilakukan dalam kultur kepemimpinan transaksional. Walaupun model kepemimpinan ini sangat banyak dipraktikkan di berbagai negara demokratis, namun sesungguhnya fenomena ini cenderung menghambat reformasi politik. Ini terjadi karena proses perubahan yang fundamental dihadang oleh kepentingan personal dari para elit politik. Menurut Przeworski (1996) sistem politik yang dibangun di atas konsesi-konsesi politik jangka pendek dan kepentingan-kepentingan kelompok atau individu adalah sistem politik yang sangat tidak stabil dan buruk dampaknya bagi konsolidasi demokrasi. Kompleksitas permasalahan lintas sektoral, dan rapuhnya kohesivitas sosial merupakan hambatan utama proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi ini karakter pemimpin yang demokratis saja tidaklah cukup.

Dibutuhkan pemimpin demokratis yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat untuk secara efektif menetapkan prioritas agenda penyelesaian masalah bangsa. Namun tentu saja lewat masanya, ketika bangsa ini dipimpin oleh figur kuat yang memusatkan seluruh proses dan dinamika politik pada genggaman kekuasaannya. Menarik untuk menengok hasil survei Lead Institute dan Indobarometer pada bulan Juli 2007 yang menunjukkan bahwa mayoritas publik di Indonesia merindukan sosok pemimpin yang visioner. Bahkan, menurut publik, kemampuan menetapkan visi ini lebih penting dari kemampuan-kemampuan teknis lainnya. Hasil survei ini, juga bisa ditafsirkan sebagai kekecewaan publik atas sepaik terjang pemimpin-pemimpin yang pragmatis dan miskin kapasitas visioner. Karena itu, sesungguhnya bangsa ini membutuhkan suatu perpaduan antara gaya kepemimpinan yang kuat serta kapasitas visioner dan kemampuan untuk membangun kultur dan cara pandang baru. Ketegasan tanpa dipandu oleh visi dan dikawal nurani hanya akan melahirkan diktator baru. Kapasitas visioner minus ketegasan dan logika hanya akan menciptakan negeri yang penuh wacana dan miskin karya. Di tengah reformasi prosedural dan kelembagaan yang signifikan, berbagai skandal memalukan yang mengiris nurani publik justru semakin gencar terjadi. Tidaklah salah kalau banyak yang meyakini bahwa perubahan struktural ternyata gagal diringi dengan perubahan kultural. Aktor-aktor politik dengan tabiat dan cara pandang lama kini mewarnai kehidupan berbangsa, dengan memanfaatkan disain tatanan politik baru.

Stagnasi secara kultural yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia tidaklah dapat diterabas jika pemimpin-pemimpin berwatak transaksional masih memenuhi panggung politik. Diperlukan perubahan fundamental pada aspek kultural untuk menumpas korupsi dan menegakan pemerintah yang bersih.

Bangsa ini perlu untuk diarahkan oleh suatu kepemimpinan transformasional, yaitu suatu karakter kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan pada tataran nilai. Kepemimpinan transformasional akan mampu mengajak publik untuk secara teguh menggapai tujuan-tujuan yang lebih hakiki, ketimbang sekadar pemenuhan kepentingan jangka pendek. Pemimpin dengan karakter transformasional tampil untuk secara inspirasional memvisualisasikan bentuk masyarakat baru yang ingin dicapai. Kepemimpinan transformasional para kepala daerah adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan setiap individu untuk menjadi aktor utama proses perubahan.

Pemimpin transformasional para kepala daerah merupakan "modifikasi" dari pemimpin karismatik. Dengan kata lain, semua pemimpin transformasional adalah pemimpin karismatik, namun tidak semua pemimpin karismatik adalah pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional memiliki karakter yang karismatik karena mereka mampu untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan publik untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, bagi pemimpin transformasional, ikatan yang dibangun dengan publik lebih bersifat kesamaan sistem nilai ketimbang loyalitas personal (Hughes 2001). Manakala para pemimpin karismatik kerap terjebak pada pemusatan ambisi yang kemudian justru mengerdilkan arti kepemimpinan mereka, pemimpin transformasional memberikan kontribusi substantif dengan keberhasilan mendobrak kultur lama dan merintis tatanan nilai baru. Sejarah dunia mencatat dengan tinta emas kiprah-kiprah pemimpin transformasional seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan Martin Luther King.

Namun adalah penting untuk disadari bahwa tampilnya para kepala daerah dengan kualitas seperti itu ke panggung utama bukanlah melalui proses yang instan,

namun melalui penititan karir secara berjenjang dan melalui proses yang berliku. Bagi bangsa Indonesia jelas bahwa kegagalan untuk mengikis habis tradisi jalan pintas untuk menuju kekuasaan, ketidakmampuan untuk membangun sistem meritokrasi yang kokoh dan kelalaian dalam melanggengkan tradisi regenerasi merupakan prakondisi yang sempurna untuk menuju ke arah bangsa yang gagal. Jimmy Oentoro menjelaskan bahwa Salah satu model kepemimpinan di dunia adalah kepemimpinan transformasional. Mereka yang menganut model kepemimpinan ini membawa transformasi, baik secara fisik maupun secara ide, bagi dunia; membawa perubahan mendasar. Dalam dunia kepemimpinan, Prof. Bernard Bass melontarkan kepemimpinan transformasional sebagai "Pemimpin disebut transformasional ketika mereka meningkatkan kesadaran akan apa yang benar, baik, penting, dan indah; ketika mereka membantu meningkatkan kebutuhan para pengikutnya akan prestasi dan aktualisasi diri; ketika mereka mendorong kematangan moral yang tinggi ke dalam para pengikutnya; dan ketika mereka menggerakkan para pengikutnya untuk bergerak melampaui kepentingan diri demi kebaikan kelompok, organisasi, dan masyarakat mereka." Dalam tulisan ini, kepemimpinan transformasional tidak dipandang dari sudut di atas saja, tetapi juga dari kesanggupan seorang pemimpin membawa perubahan dan besarnya perubahan yang dibawanya. Yesus Kristus merupakan salah satu pemimpin transformasional dunia. Pandangan-pandangan Yesus membawa terobosan baru dalam filosofi kehidupan manusia dan berpengaruh hingga saat ini. Saya percaya pengaruh-Nya, bahkan sampai zaman yang akan datang. Pendekatan Yesus melalui kasih, pengorbanan, dan damai membawa inspirasi bagi banyak pemimpin dunia, termasuk Martin Luther King Jr. dan Mahatma Gandhi. Lee Kuan Yew, mantan PM Singapura, membawa Singapura, sebuah negara dengan wilayah terbatas, tanpa sumber daya alam, negara dunia ketiga

yang miskin dan penuh korupsi, menuju sebuah negara maju yang relatif bebas korupsi. Martin Luther King Jr. dengan konsep kesetaraan ras, Mother Theresa dengan hati penuh belas kasihan, hingga Thomas Jefferson, bapak demokrasi modern. Mereka membawa transformasi dalam komunitas, kota, dan bangsa-bangsa, menjadi inspirasi bagi para pengikutnya untuk terus bertumbuh, memegang teguh integritas, serta bekerja bagi kepentingan umum. Berikut ini adalah beberapa ciri pemimpin transformasional.

Pertama, memimpin dengan "vision & passion". Pemimpin yang memiliki visi dan semangat (passion) akan menyuntikkan energi kepada para pengikutnya. Visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan. "Passion" didefinisikan sebagai keinginan yang kuat, dan dedikasi untuk sebuah aktivitas (Webster dictionary). Seseorang pernah berkata, "Tidak ada hal hebat di dunia yang dicapai tanpa keinginan yang kuat." Kombinasi keduanya merupakan kekuatan tak terkalahkan dalam mewujudkan transformasi.

Kedua, Memimpin dengan perbuatan. Beberapa pemimpin mencapai tujuannya dengan menggunakan pedang, yang lain dengan kata-kata dan teladan. Orang mungkin terkesan dengan perkataan Anda, tetapi mereka akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Anda harus memiliki integritas pribadi, utuh dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Ini menyangkut tanggung jawab, konsistensi, kejujuran, ketulusan, komitmen, disiplin, sifat dapat dipercaya, dan kesetiaan. Inilah kebutuhan mendasar kepemimpinan transformasional. Berfokuslah untuk membangun karakter dan kemurnian, bukan sukses dan prestasi.

Ketiga, Memimpin dengan inovasi. Inovasi adalah membangun cara baru dan lebih baik demi sebuah tujuan. Pemimpin transformasional banyak terlibat dalam perubahan menuju kebaikan. Tak sedikit pemimpin sangat efektif memimpin "status quo". Mereka bisa juga sangat berpengaruh, tetapi tidak membawa perubahan. Mereka sangat efektif mengatur kursi-kursi di dek Titanic, tetapi tak dapat mencegah kapal tenggelam! Tak ada kemajuan tanpa perubahan. Stop berpikir "Bila tidak rusak dan tidak ada masalah, mengapa harus diperbaiki?".

Keempat, Menekankan "human nature". Transformasi bicara tentang perubahan, dan manusialah pembawa perubahan tersebut. Pemimpin transformasional dapat memotivasi pengikut dan komunitasnya untuk terlibat dalam perubahan. Ia mengajak orang berubah dan melakukan perubahan, ahli dalam menyelaraskan talenta setiap individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan demi hasil yang maksimal. Ia mampu mencari, memperlengkapi, dan mendorong orang-orang untuk membawa visi menjadi kenyataan.

Kelima, Memiliki belas kasihan. Sebuah studi dari Cornell University's Johnson Graduate School of Management menyatakan bahwa 'compassion' (belas kasihan) dan kemampuan membangun tim adalah dua karakteristik terpenting kesuksesan pemimpin dunia usaha pada satu dekade mendatang. Belas kasihan menyangkut kasih, pengertian, perhatian, kebaikan, rasa terima kasih, penghargaan, dan ketulusan. Kepemimpinan semacam ini akan mendorong orang untuk memberikan yang terbaik dan bekerja penuh sukacita, bahkan dalam tugas-tugas yang sangat berat sekalipun. Belas kasihan jugalah yang memberi motivasi bagi pemimpin transformasional untuk mengadakan perubahan di masyarakat: bagaimana organisasi dapat menolong korban bencana alam, memerangi ketidakadilan ekonomi,

membangun komunitas menjadi sejahtera, dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah untuk didiami.

Keenam, Membangun secara institusional dan sistematis. Bicara tentang transformasi adalah berbicara tentang kerja keras bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Pemimpin transformasional memastikan bahwa pekerjaannya dapat dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, yang terus berkembang, maju, dan memberikan kontribusi yang lebih luas.

Ketujuh, Memberi dampak pada "grass root level". Hasil karya seorang pemimpin transformasional harus dapat dirasakan masyarakat tingkat akar rumput, contohnya hasil karya Martin Luther King Jr. dapat dirasakan masyarakat Amerika dalam persamaan hak antar ras.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Masyarakat menilai bahwa kepala daerah se-Indonesia cenderung hanya berorientasi sebagai pemimpin daerahnya dan bukan memposisikan dirinya sebagai pemimpin nasional secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.
2. *Transformational leadership* adalah dimensi yang paling dominan menentukan terbentuknya *political nationalism leadership engagement* kepala daerah se-Indonesia secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.
3. Terdapat perbedaan dalam hal *political nationalism leadership engagement* kepala daerah se-Indonesia jika Dibedakan Berdasarkan Kategori Latar Belakangnya:

Terdapat perbedaan dalam hal *Political Nationalism Leadership Engagement* Kepala Daerah se-Indonesia jika dibedakan berdasarkan partai pendukung utama kepala daerah dengan F sebesar 2,087 significance value 0,027 adalah signifikan pada $\alpha < 0,05$. Penilaian masyarakat terhadap kepala daerah yang berasal dari PKS, kepemimpinannya lebih berorientasi sebagai pemimpin daerah dan bukan sebagai pemimpin nasional dibanding yang dari PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Terdapat perbedaan dalam hal *Transformational Leadership* (X_3) para Kepala Daerah se-Indonesia jika dibedakan berdasarkan partai pendukung utama kepala daerah dengan F sebesar 3,511 significance value 0,008 adalah signifikan pada $\alpha < 0,05$. Penilaian masyarakat terhadap kepala daerah yang berasal dari PKS, kepemimpinannya tidak transformatif dibanding yang dari PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Terdapat perbedaan dalam hal Political Nationalism Leadership Engagement Kepala Daerah se-Indonesia jika dibedakan berdasarkan usia kepala daerah dengan F sebesar 4,912 significance value 0,008 adalah signifikan pada $\alpha < 0,05$. Kepala daerah yang usianya kurang dari 40 tahun lebih memiliki orientasi sebagai pemimpin daerah dan bukan sebagai pemimpin nasional dibanding kepala daerah yang usianya di atas 40 tahun secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Terdapat perbedaan dalam hal *Transformational Leadership* (X_3) para Kepala Daerah se Indonesia jika dibedakan berdasarkan usianya dengan F sebesar 4,172 significance value 0,017 adalah signifikan pada $\alpha < 0,05$. Penilaian masyarakat terhadap kepala daerah yang usianya kurang dari 40 tahun ternyata tidak transformatif dibanding kepala daerah yang usianya di atas 40 tahun secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, ternyata kepala daerah yang bergelar S1 atau S2 atau S3 sama-sama memiliki kepemimpinan yang orientasinya sebagai pemimpin daerah dan bukan sebagai pemimpin nasional secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, ternyata kepala daerah yang bergelar S2 itu lebih transformatif dibanding yang bergelar S1 atau S3 dengan F sebesar 3,137 dengan significance value 0,045 adalah signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Jika dilihat dari profesi sebelum menjabat kepala daerah, ternyata kepala daerah yang tadinya berasal dari pengusaha, fungsionaris partai maupun pengusaha yang merangkap fungsionaris partai ternyata kepemimpinannya sama-sama orientasinya sebagai pemimpin daerah dan bukan sebagai pemimpin nasional secara signifikan pada $\alpha < 0,05$. Dan juga sama-sama tidak transformatif dengan F sebesar 1,244 secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Terwujudnya kepala daerah yang kepemimpinannya mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat guna memampukan semua komponen melihat daerah sebagai Indonesia dalam rangka terciptanya kepemimpinan kepala daerah yang secara politis terpaut bukan kepada partai politik dan daerahnya, tetapi berpaut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan *Political Nationalism Leadership Engagement* kepala Daerah se Indonesia maka diperlukan adanya pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin merupakan tokoh sentral dan pemimpin harus menyadari kekuatan dari masing-masing pengikutnya dan mengidentifikasi daerah-daerah sehingga dapat focus dalam melakukan berbagai upaya perbaikan (Bruce E. Winston dan Kathleen Patterson, 2006). Pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi agar lebih efektif sehingga mampu memberdayakan pengikut, membangun kepercayaan dan rasa hormat mereka (Aric Hall, 2007). Sebagaimana diketahui bahwa gaya kepemimpinan dan kompetensi pemimpin merupakan elemen kunci (J. Rodney Turner dan Ralf Muller, 2005).

Peneliti memberikan sumbang saran implementasi kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas pemimpin agar lebih transformatif. Pemimpin perlu dibekali dengan berbagai kompetensi sehingga mampu bekerja secara adaptif dan fleksibel terlebih dalam menghadapi perubahan sehingga mampu menghadapi tantangan serta menghasilkan solusi kreatif untuk berbagai permasalahan yang kompleks (Bennis, 2001).

Pemimpin yang transformasional mampu menjadi motor penggerak sekaligus pemancar budaya inovatif. Pemimpin yang transformasional juga menyebarkan pengetahuan yang berorientasi pada peningkatan kinerja (Garcia-

Morales, Jimenez-Barrionuevo dan Gutierrez-Gutierrez, 2012). Pemerintah juga perlu mengupayakan pemberdayaan kepala daerah sebagai pemimpin yang senantiasa menyadari tindakannya sehingga para pengikutnya tahu apa yang benar dan penting. Proses ini dilakukan dengan memberikan motivasi untuk memenuhi harapan dan mendorong mereka melihat jauh ke dalam dirinya demi kebaikan organisasi (Muenjohn, 2007). Kondisi ini sangat penting agar terwujud pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan mau bergerak sekalipun dalam kondisi yang susah (Bass, 1985).

Terwujudnya sistem kaderisasi partai politik yang berorientasi pada negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaderisasi dalam partai politik sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian ditengah iklim perubahan, kaderisasi partai politik harus dilakukan secara murni dan tetap memegang teguh falsafah dan ideologi bangsa sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya ini harus dilakukan secara simultan dan paralel oleh berbagai pihak mengingat peran penting pemimpin dalam membawa arah politik yang memegang teguh prinsip nasionalisme sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki beraneka keragaman baik budaya, suku bangsa, agama dan golongan. Kondisi Indonesia yang multikultural menjadikan Indonesia sangat rentan oleh berbagai isu politik. Namun dengan adanya pemimpin yang nasionalis maka dapat membantu pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam melakukan kaderisasi politik, karakter kebangsaan yang mencerminkan ideologi Pancasila harus senantiasa dihidupkan. Pemimpin harus

mampu mewujudkan diri sebagai pemimpin yang memiliki karakter kerohanian yang meyakini keTuhanan yang Maha Esa, karakter kemanusiaan yang adil dan beradab, karakter persatuan Indonesia, karakter kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta karakter yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Terwujudnya sistem kepemimpinan nasional yang terintegrasi pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa.

Kondisi demografi bangsa Indonesia harus menjadi dasar bagi para pemimpin untuk senantiasa mewujudkan kepemimpinan yang nasionalis yang tidak membedakan daerah satu dengan yang lain, namun tetap memandang sama berbagai daerah ini sehingga dapat menerapkan kepemimpinan nasional yang terintegrasi. Kebijakan pusat harus dapat dirasakan sama di setiap daerah dan kondisi setiap daerah juga senantiasa menjadi pertimbangan bagi pusat dalam menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan.

Dalam rangka mewujudkan kepala daerah yang kepemimpinannya mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat guna memungkinkan semua komponen melihat daerah sebagai Indonesia dalam rangka terciptanya kepemimpinan kepala daerah yang secara politis terpaut bukan kepada partai politik dan daerahnya, tetapi berpaut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sistem kaderisasi partai politik harus berorientasi pada negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mewujudkan sistem kepemimpinan nasional yang terintegrasi pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa.

Perubahan paradigma berpikir, sikap dan perilaku ini berpaut pada jiwa individu masyarakat. Hasil temuan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah:

Masyarakat Menilai bahwa Kepala Daerah se-Indonesia Cenderung Hanya Berorientasi sebagai Pemimpin Daerah Secara Signifikan Pada $\alpha < 0,05$ ²¹⁶, dan *transformational leadership* kepala daerah adalah indikator yang paling dominan menentukan terbentuknya *political nationalism leadership engagement* dan temuan lainnya adalah adanya perbedaan *political nationalism leadership engagement* jika dibedakan berdasarkan katagori latar belakang kepala daerah.

Dari temuan tersebut di atas pada dasarnya adalah menyangkut jiwa, sikap dan perilaku nasionalisme yang menurut peneliti merupakan masalah yang cukup serius bagi bangsa Indonesia dan perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin mampu menerapkan *idealized influence*, dimana pemimpin dikagumi, dihormati dan dipercaya. Pengikut mengidentifikasikan dengan keinginan meniru pemimpin mereka.
2. Pemimpin secara konsisten melakukan segala sesuatu berdasarkan etika, prinsip dan nilai-nilai.
3. Pemimpin menerapkan *inspirational motivation* dimana pemimpin berperilaku dengan cara yang memotivasi orang-orang di sekitar mereka dengan memberikan arti dan tantangan bagi pengikutnya sehingga membuat mereka termovasi, semangat, antusias dan optimis.
4. Pemimpin menerapkan *intellectual stimulation* yaitu mendorong pengikutnya untuk lebih kreatif dan inovatif dan memberikan ide baru dalam menangani permasalahan.

²¹⁶Perhitungan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 11.

5. Pemimpin juga harus memiliki pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan setiap individu untuk berprestasi dan bertumbuh sehingga dapat mengembangkan potensi dan memiliki kesempatan baru untuk terus belajar.
6. Pemimpin mampu menjadi model dalam berperilaku secara etis sehingga pengikut dapat merasakan energi dengan tujuan yang jelas serta mampu mengidentifikasi pemimpin berikut visinya, serta
7. Pemimpin mampu merespon segera setiap masalah yang menjadi serius untuk mengambil tindakan korektif serta menghindari mengambil keputusan terlebih dahulu.

Salah satu parameter untuk mengukur kualitas demokratisasi adalah sirkulasi kepemimpinan politik yang lancar dengan sokongan kaderisasi kepemimpinan yang melembaga. Kontestasi politik pada sistem demokrasi liberal semestinya dikawal oleh ketersediaan jalur-jalur kaderisasi kepemimpinan yang mampu memunculkan kader-kader pemimpin politik yang handal. Ada indikasi yang sangat kuat bahwa reformasi di tingkat kelembagaan dan prosedural yang telah digulirkan selama hampir satu dasawarsa di negeri ini, nyaris tidak disertai dengan perbaikan yang signifikan pada jalur kaderisasi kepemimpinan politik. Publik seolah masih dipaksa untuk memberikan ruang di panggung politik bagi aktor-aktor lama. Sementara ironisnya, sebagian besar survai yang dilakukan menunjukkan kerinduan publik atas tampilnya figur pemimpin alternatif. Tampilnya politisi-saudagar yang mendominasi panggung utama politik Indonesia juga ternyata belum banyak pengaruhnya bagi modernisasi parpol. Harapan akan terjadinya proses penguatan organisasi parpol di bawah kendali para *entrepreneur* ini belum sepenuhnya terjadi. Kinerja partai politik justru semakin mengecewakan publik. Partai politik kini cenderung didominasi oleh

faksi-faksi politik dengan orientasi yang kuat ke arah pragmatisme. Jika partai politik yang semestinya menjadi institusi inti dalam proses demokratisasi saja sudah bercorak pragmatistis, sulit dibayangkan bahwa demokratisasi juga akan diwarnai oleh nilai-nilai dan tradisi berpolitik yang baru.

Dalam khasanah studi kepemimpinan, gaya kepemimpinan politisi-saudagar ini bisa dikategorikan sebagai kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*). Model kepemimpinan ini terjadi ketika pola relasi antara pemimpin dengan konstituen, maupun antara pemimpin dengan elit politik lainnya dilandasi oleh semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik (Burns 1978). Transaksi suara, janji-janji material bagi pemilih dan penghargaan atas loyalitas personal merupakan praktik-praktik yang lazim dilakukan dalam kultur kepemimpinan transaksional. Walaupun model kepemimpinan ini sangat banyak dipraktikkan di berbagai negara demokratis, namun sesungguhnya fenomena ini cenderung menghambat reformasi politik. Ini terjadi karena proses perubahan yang fundamental dihadap oleh kepentingan personal dari para elit politik. Menurut Przeworski (1996) sistem politik yang dibangun di atas konsesi-konsesi politik jangka pendek dan kepentingan-kepentingan kelompok atau individu adalah sistem politik yang sangat tidak stabil dan buruk dampaknya bagi konsolidasi demokrasi. Kompleksitas permasalahan lintas sektoral, dan rapuhnya kohesivitas sosial merupakan hambatan utama proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi ini karakter pemimpin yang demokratis saja tidaklah cukup. Dibutuhkan pemimpin demokratis yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat untuk secara efektif menetapkan prioritas agenda penyelesaian masalah bangsa. Namun tentu saja lewat masanya, ketika bangsa ini dipimpin oleh figur kuat yang memusatkan seluruh proses dan dinamika politik pada genggamannya. Menarik untuk menengok hasil

survai Lead Institute dan Indobarometer pada bulan Juli 2007 yang menunjukkan bahwa mayoritas publik di Indonesia merindukan sosok pemimpin yang visioner. Bahkan, menurut publik, kemampuan menetapkan visi ini lebih penting dari kemampuan-kemampuan teknis lainnya. Hasil survei ini, juga bisa ditafsirkan sebagai kekecewaan publik atas sepak terjang pemimpin-pemimpin yang pragmatis dan miskin kapasitas visioner. Karena itu, sesungguhnya bangsa ini membutuhkan suatu perpaduan antara gaya kepemimpinan yang kuat serta kapasitas visioner dan kemampuan untuk membangun kultur dan cara pandang baru. Ketegasan tanpa dipandu oleh visi dan dikawal nurani hanya akan melahirkan diktator baru. Kapasitas visioner minus ketegasan dan logika hanya akan menciptakan negeri yang penuh wacana dan miskin karya. Di tengah reformasi prosedural dan kelembagaan yang signifikan, berbagai skandal memalukan yang mengiris nurani publik justru semakin gencar terjadi. Tidaklah salah kalau banyak yang meyakini bahwa perubahan struktural ternyata gagal diringi dengan perubahan kultural. Aktor-aktor politik dengan tabiat dan cara pandang lama kini mewarnai kehidupan berbangsa, dengan memanfaatkan disain tatanan politik baru.

Stagnasi secara kultural yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia tidaklah dapat diterabas jika pemimpin-pemimpin berwatak transaksional masih memenuhi panggung politik. Diperlukan perubahan fundamental pada aspek kultural untuk menumpas korupsi dan menegakan pemerintah yang bersih. Bangsa ini perlu untuk diarahkan oleh suatu kepemimpinan transformasional, yaitu suatu karakter kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan pada tataran nilai. Kepemimpinan tranformasional akan mampu mengajak publik untuk secara teguh menggapai tujuan-tujuan yang lebih hakiki, ketimbang sekadar pemenuhan kepentingan jangka pendek. Pemimpin dengan karakter transformasional trampil untuk secara inspirasional

memvisualisasikan bentuk masyarakat baru yang ingin dicapai. Kepemimpinan transformasional para kepala daerah adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan setiap individu untuk menjadi aktor utama proses perubahan.

Pemimpin transformasional para kepala daerah merupakan "modifikasi" dari pemimpin karismatik. Dengan kata lain, semua pemimpin transformasional adalah pemimpin karismatik, namun tidak semua pemimpin karismatik adalah pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional memiliki karakter yang karismatik karena mereka mampu untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan publik untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, bagi pemimpin transformasional, ikatan yang dibangun dengan publik lebih bersifat kesamaan sistem nilai ketimbang loyalitas personal (Hughes 2001). Manakala para pemimpin karismatik kerap terjebak pada pemusatan ambisi yang kemudian justru mengerdilkan arti kepemimpinan mereka, pemimpin transformasional memberikan kontribusi substantif dengan keberhasilan mendobrak kultur lama dan merintis tatanan nilai baru. Sejarah dunia mencatat dengan tinta emas kiprah-kiprah pemimpin transformasional seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan Martin Luther King.

Namun adalah penting untuk disadari bahwa tampilnya para kepala daerah dengan kualitas seperti itu ke panggung utama bukanlah melalui proses yang instan, namun melalui penitisan karir secara berjenjang dan melalui proses yang berliku. Bagi bangsa Indonesia jelas bahwa kegagalan untuk mengikis habis tradisi jalan pintas untuk menuju kekuasaan, ketidakmampuan untuk membangun sistem meritokrasi yang kokoh dan kelalaian dalam melanggengkan tradisi regenerasi merupakan prakondisi yang sempurna untuk menuju ke arah bangsa yang gagal. Jimmy Oentoro menjelaskan bahwa Salah satu model kepemimpinan di dunia adalah kepemimpinan transformasional. Mereka yang menganut model kepemimpinan ini

membawa transformasi, baik secara fisik maupun secara ide, bagi dunia; membawa perubahan mendasar. Dalam dunia kepemimpinan, Prof. Bernard Bass melontarkan kepemimpinan transformasional sebagai "Pemimpin disebut transformasional ketika mereka meningkatkan kesadaran akan apa yang benar, baik, penting, dan indah; ketika mereka membantu meningkatkan kebutuhan para pengikutnya akan prestasi dan aktualisasi diri; ketika mereka mendorong kematangan moral yang tinggi ke dalam para pengikutnya; dan ketika mereka menggerakkan para pengikutnya untuk bergerak melampaui kepentingan diri demi kebaikan kelompok, organisasi, dan masyarakat mereka." Dalam tulisan ini, kepemimpinan transformasional tidak dipandang dari sudut di atas saja, tetapi juga dari kesanggupan seorang pemimpin membawa perubahan dan besarnya perubahan yang dibawanya. Yesus Kristus merupakan salah satu pemimpin transformasional dunia. Pandangan-pandangan Yesus membawa terobosan baru dalam filosofi kehidupan manusia dan berpengaruh hingga saat ini. Saya percaya pengaruh-Nya, bahkan sampai zaman yang akan datang. Pendekatan Yesus melalui kasih, pengorbanan, dan damai membawa inspirasi bagi banyak pemimpin dunia, termasuk Martin Luther King Jr. dan Mahatma Gandhi. Lee Kuan Yew, mantan PM Singapura, membawa Singapura, sebuah negara dengan wilayah terbatas, tanpa sumber daya alam, negara dunia ketiga yang miskin dan penuh korupsi, menuju sebuah negara maju yang relatif bebas korupsi. Martin Luther King Jr. dengan konsep kesetaraan ras, Mother Theresa dengan hati penuh belas kasihan, hingga Thomas Jefferson, bapak demokrasi modern. Mereka membawa transformasi dalam komunitas, kota, dan bangsa-bangsa, menjadi inspirasi bagi para pengikutnya untuk terus bertumbuh, memegang teguh integritas, serta bekerja bagi kepentingan umum. Berikut ini adalah beberapa ciri pemimpin transformasional.

Pertama, memimpin dengan "vision & passion". Pemimpin yang memiliki visi dan semangat (passion) akan menyuntikkan energi kepada para pengikutnya. Visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan. "Passion" didefinisikan sebagai keinginan yang kuat, dan dedikasi untuk sebuah aktivitas (Webster dictionary). Seseorang pernah berkata, "Tidak ada hal hebat di dunia yang dicapai tanpa keinginan yang kuat." Kombinasi keduanya merupakan kekuatan tak terkalahkan dalam mewujudkan transformasi.

Kedua, Memimpin dengan perbuatan. Beberapa pemimpin mencapai tujuannya dengan menggunakan pedang, yang lain dengan kata-kata dan teladan. Orang mungkin terkesan dengan perkataan Anda, tetapi mereka akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Anda harus memiliki integritas pribadi, utuh dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Ini menyangkut tanggung jawab, konsistensi, kejujuran, ketulusan, komitmen, disiplin, sifat dapat dipercaya, dan kesetiaan. Inilah kebutuhan mendasar kepemimpinan transformasional. Berfokuslah untuk membangun karakter dan kemurnian, bukan sukses dan prestasi.

Ketiga, Memimpin dengan inovasi. Inovasi adalah membangun cara baru dan lebih baik demi sebuah tujuan. Pemimpin transformasional banyak terlibat dalam perubahan menuju kebaikan. Tak sedikit pemimpin sangat efektif memimpin "status quo". Mereka bisa juga sangat berpengaruh, tetapi tidak membawa perubahan. Mereka sangat efektif mengatur kursi-kursi di dek Titanic, tetapi tak dapat mencegah kapal tenggelam! Tak ada kemajuan tanpa perubahan. Stop berpikir "Bila tidak rusak dan tidak ada masalah, mengapa harus diperbaiki?".

Keempat, Menekankan "human nature". Transformasi bicara tentang perubahan, dan manusialah pembawa perubahan tersebut. Pemimpin transformasional dapat memotivasi pengikut dan komunitasnya untuk terlibat dalam

perubahan. Ia mengajak orang berubah dan melakukan perubahan, ahli dalam menyalurkan talenta setiap individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan demi hasil yang maksimal. Ia mampu mencari, memperlengkapi, dan mendorong orang-orang untuk membawa visi menjadi kenyataan.

Kelima, Memiliki belas kasihan. Sebuah studi dari Cornell University's Johnson Graduate School of Management menyatakan bahwa 'compassion' (belas kasihan) dan kemampuan membangun tim adalah dua karakteristik terpenting kesuksesan pemimpin dunia usaha pada satu dekade mendatang. Belas kasihan menyangkut kasih, pengertian, perhatian, kebaikan, rasa terima kasih, penghargaan, dan ketulusan. Kepemimpinan semacam ini akan mendorong orang untuk memberikan yang terbaik dan bekerja penuh sukacita, bahkan dalam tugas-tugas yang sangat berat sekalipun. Belas kasihan jugalah yang memberi motivasi bagi pemimpin transformasional untuk mengadakan perubahan di masyarakat: bagaimana organisasi dapat menolong korban bencana alam, memerangi ketidakadilan ekonomi, membangun komunitas menjadi sejahtera, dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah untuk didiami.

Keenam, Membangun secara institusional dan sistematis. Bicara tentang transformasi adalah berbicara tentang kerja keras bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Pemimpin transformasional memastikan bahwa pekerjaannya dapat dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, yang terus berkembang, maju, dan memberikan kontribusi yang lebih luas.

Ketujuh, Memberi dampak pada "grass root level". Hasil karya seorang pemimpin transformasional harus dapat dirasakan masyarakat tingkat akar rumput, contohnya hasil karya Martin Luther King Jr. dapat dirasakan masyarakat Amerika dalam persamaan hak antar ras.

SARAN

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penilaian masyarakat terhadap Kepala Daerah se Indonesia cenderung hanya berorientasi sebagai pemimpin daerahnya dan bukan memposisikan dirinya sebagai pemimpin nasional, hal ini akan berdampak negatif terhadap keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan :
 - a. Bagi Kepala Daerah yang sedang menjabat perlu segera dilakukan penataran dan penghayatan serta penandatanganan pakta integritas tentang pentingnya seorang Kepala Daerah di samping sebagai pemimpin daerah juga memposisikan dirinya sebagai pemimpin nasional, sehingga arah kebijakan daerah berorientasi dan menyatu dengan kebijakan nasional.
 - b. Bagi Kepala Daerah yang belum menjabat/belum dilantik tapi sudah terpilih dalam pilkada sebelum menjabat perlu dibekali informasi dan penghayatan betapa pentingnya memposisikan dirinya sebagai pemimpin nasional.
 - c. Menandatangani pakta integritas keutuhan NKRI sebagai harga mati, dan arah kebijakan daerah harus berorientasi dan menyatu dengan kebijakan nasional.
 - d. Pendidikan Lemhanas terus dikembangkan.
 - e. Diadakan evaluasi secara berkala.
2. Bagi setiap orang yang mencalonkan diri untuk mengikuti pilkada Bupati/Walikota harus telah mengikuti tes psikologi bahwa ybs telah

menjiwai kepemimpinan politik yang nasionalis dan dinyatakan dapat mengikuti pilkada.

3. Perlu adanya amandemen Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah, yang menambahkan Ketentuan persyaratan Bakal calon Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada harus telah mengikuti Uji Psikologi dari Lembaga Perguruan tinggi yang kredibel bahwa bakal calon telah menjiwai kepemimpinan politik yang nasionalis dan kepemimpinan yang transformatif, dan telah dinyatakan lulus
4. Diperlukan juga amandemen Undang-Undang tentang Partai politik.
5. Perlu adanya indoktrinasi tentang pandangan/wawasan bahwa daerah adalah satu kesatuan yang utuh dengan Indonesia, dan informasi tentang pentingnya kepemimpinan yang transformatif bagi setiap anggota masyarakat.
6. UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) yang telah dibentuk Presiden agar segera diimplementasikan di semua lapisan masyarakat karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
7. Kementerian Kominfo agar mengharuskan semua media (cetak, elektronik, sosial), agar selalu mengingatkan masyarakat pentingnya jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan persatuan / kesatuan bangsa serta keutuhan nasional.
8. Bagi Kementerian Pendidikan, agar mengharuskan adanya kurikulum pendidikan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, persatuan / kesatuan bangsa dan keutuhan nasional mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.
9. Untuk Kementerian Penertiban Aparatur Negara menerbitkan surat kepada seluruh aparatur negara dan swasta untuk melakukan upacara pada setiap hari senin dengan tujuan penanaman dalam jiwa untuk setiap aparatur negara dan

swasta tentang jiwa nasionalisme, cinta tanah air, persatuan/kesatuan dan keutuhan nasional.

10. Undang-undang tentang partai politik juga perlu di amandemen dengan menambahkan persyaratan tambahan untuk rekrutmen Kepala Daerah yaitu bakal calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat telah lulus uji kejiwaan bahwa bakal calon Kepala Daerah benar-benar telah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dan memiliki kepemimpinan yang transformatif.

Dari hasil *Forum Discussion Group*, bersama Bp. Yorris Raweyai, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, pada tanggal 06 Juli 2017, di rumahnya dihadiri oleh Bp. Dr. Arnold Tindas, Bp. Prof. Dr. Sasmoko, Bp. Tatang Iman Sadewo, dan saya, dan pada tanggal 07 Juli 2017 bersama Bp. Mayjen (Purnawirawan) Arifin Seman, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di Rumah Makan Kampung air, Cibubur, yang dihadiri oleh Bp. Dr. Arnold Tindas, Bp. Tatang Iman Sadewo, dan saya. Mengenai hasil temuan dalam penelitian ini, pada dasarnya Bapak-Bapak berdua secara garis besar memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk jangka pendek, perlu adanya pembenahan dengan segera tata cara perekrutan Bakal calon Kepala Daerah yang benar-benar mempunyai jiwa dan sikap terpaut dengan NKRI oleh Partai Politik, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sampai ke Dewan Pimpinan Pusat yang menetapkan Calon Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada. Walaupun sekarang sudah tertata rapi dan baik perlu adanya penambahan-penambahan kriteria.

2. Para fungsionaris partai politik perlu juga dibekali *Political Nationalism Leadership Engagement* mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat DPC, tingkat DPD dan tingkat DPP, serta perekrutan kader partai politik yang berorientasi pada NKRI.
3. Untuk jangka panjang, karena ini menyangkut Undang-Undang, maka sangat diperlukan Pemimpin yang kuat pada puncak pimpinan negara ini dengan para pembantunya yang kuat pula, sehingga semua kebijakan pimpinan puncak dapat dilaksanakan sampai masyarakat lapisan bawah.